Media Ekonomi dan Bisnis
Volume 2 Nomor 1 Januari 2025 Halaman 122-128 ISSN (Online) 3063-6566

Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa Menggunakan Pedoman Akuntansi Dana Desa

Muthia Zhahira Syahwa [1], Yunita Atika [2], Nevellinda Nur Fathiyyah [3], Rewie Angglifisia[4]

Universitas Bina Sarana Informatika
Jl. Kramat Raya No. 98, Jakarta Pusat, Indonesia

email korespondensi: muthiazhas@gmail.com

Abstrak
Penelitian ini membahas penerapan terhadap akuntansi sektor publik dalam pengelolaan keuangan pemerintahan desa, dengan fokus pada Desa Rarang Selatan, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur. Tujuannya adalah dapat mengerti bagaimana posisi akuntansi sektor publik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintahan desa, serta kontribusinya terhadap pembangunan desa yang berkelanjutan. Metode yang dipakai pada studi ini ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan studi kasus di Desa Rarang Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan akuntansi yang tepat dan prosedur penyusunan anggaran yang efektif sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan. Analisis terhadap penerapan kebijakan akuntansi dan pengelolaan anggaran menunjukkan bahwa Desa Rarang Selatan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, yang mencerminkan pengelolaan keuangan yang teratur dan sistematis.

Kata Kunci : Sektor publik, Sistem Keuangan desa, Akuntansi dana desa

Abstracts
Village, Terara District, East Lombok Regency. The aim is to understand how the position of public sector accounting can increase the transparency and accountability of village government finances, as well as its contribution to sustainable village development. The method used in this study is descriptive research with a qualitative approach, with a case study in South Rarang Village. The research results show that appropriate accounting policies and effective budget preparation procedures are significant in achieving sustainable village development goals. Analysis of the implementation of accounting policies and budget management shows that Rarang Selatan Village has fulfilled the specified requirements, which reflects orderly and systematic financial management.

Keywords : Public sector, village financial system, village fund accounting

1. Pendahuluan

Akuntansi sektor publik ialah instrument akuntansi yang digunakan untuk mengatur keuangan negara ynag dikeloola oleh pemerintah pusat, intitusi negara serta dapartemen terkait, netitas layanan publik, pemerintah daerah,unit pelayanan publik tingkat daerah serta masyarakat luas (Nevi Costari & Putri Ariella Belinda, 2021)

Pemerintah desa merupakan bagian unit terkecil dari struktur administratif suatu negara yang memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintahan desa

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Published under licence by Antartika Media Indonesia.

bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan desa agar pengelolaan lebih baik dan efisien . dalam penerapannya akuntansi sektor publik dapat meningkatkan transaparasi dan keakuntanbilitasan suatu laporan keuangan .

Kemampuan pemerintah desa dalam mengelola sumber daya finansial yang baik berperan penting untuk mencapai keberhasilan pembangunan di tingkat desa. Dengan menerapkan akuntansi sektor publik, desa dapat mengoptimalkan penggunaan dana publik, meningkatkan kekuatan ekonomi lokal, dan memberikan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakatnya.

Mengimplementasikan akuntansi sektor publik di tingkat desa tidaklah mudah. Desa seringkali menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur yang minim, dan kurangnya pemahaman akan pentingnya akuntabilitas keuangan. Namun, dengan adanya dedikasi dan dorongan yang besar dari pihak manapun, terbuka pula peluang untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa dan memperkuat partisipasi penduduk desa dalam mengambil keputusan.

Tujuan meneliti ialah untuk melihat bagaimana peng-implementasian akuntansi sektor publik terhadap sistem keuangan pemerintahan desa. Studi ini berfokus pada metode yang dapat diterapkan oleh pemerintah desa untuk memperbaiki system akuntansi mereka, dengan tujuan untuk memperkuat transparansi dan pertanggungjawaban finansial. Dengan demikian, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberi manfaat yang lebih terhadap peningkatan sistem keuangan desa serta kualitas layannan kepada masyarakat.

Pengertian Desa

Kata “Desa” berasal dari kata Sansekerta "deca", memiliki arti "tanah air", "tanah kelahiran". Desa didasarkan pada keturunan dan tradisi yang terakui oleh pemerintah pusat dan berfokus pada kerangka pemerintahan, terutama otonomi daerah. Desa juga merupakan komunitas hukum yang memiliki otoritas untuk mengelola warganya sendiri (Nabila Fitriani Derajat1, Mahrawi2, 2022).

Sebuah desa merupakan hasil daeri interaksi antara manusia dan lingkungannya. Desa menampakan dirinya melalui unsur seperti fisiografi, sosial, ekonomi,politik, dan budaya yang berinteraksi satu sama lain serta terhubung dengan daerah – daerah lain (Ramlan Sihombing, 2021)

Pemerintah desa ialah entitas pemerintahan tingkat terendah di Indonesia yang berperan sebagai penyedia layanan publik secara langsungg kepada warga desa. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan Republik Indonesia, pemerintah desa mempunyai tugas dalam mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan lokal. Dalam menjalankan fungsi tersebut agar efektif, pemerintah desa diberikan wewenang yang mencakup pengaturan administrasi desa, pengembangan infrastruktur desa, pengembangan sosial masyarakat, serta pemberdaya masyarakat yang didasarkan dengan inisiatif warga, hak asal – usul serta tradisi sekitar.

Adapun ciri – ciri desa yang ada di Indonesia: tingkat kepadatan penduduk didesa lebih sedikit daripada dikota; rata – rata penduduk desa bermata pencaharian sebagai petani; kegiatan sehari – hari masyarakat desa bergantung bpada alam,iklim serta cuaca; norma dan tradisi didesa masih sangat dalam dan dihormati dalam kehidupan biasanya.

Pengertian Dana Desa

Sejumlah dana yang dikelola dan dialokasikan untuk desa yang berawal dari pemerintah disebut juga dana desa, anggaran tersebut di dapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Modal tersebut akan dibelanjakan dan membiayai penyelenggaraan dan kegiatan pemerintah desa,pelaksnaan bangunan, dan pembinaan serta pemberdayaan kemasyarakatan (Pardede et al., 2021). Pengelolaan dana desa diarahkan untuk meningkatkan

standar hidup di desa, mengatasi masalah kemiskinan, dan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam Pembangunan desa.

Pengertian Nilai uang *(Value Of Money)*

Konsep Value For Money ialah konsep untuk mengelola organisasi publik dengan mengutamakan pada penggunaansumber daya yang hemat,efisien, dan efektif. Oleh karena itu, prinsip ini dijadikan sebagai ukuran kinerja organisasi untuk menilai keberhasilan program kerja organisasi untuk mencapai hasil yang di harapkan (Sari et al., 2021).

Pengertian Pendapatan

Berdasarkan Kemendagri RI 2014 pendapatan ialah jumlah uang yang diterima oleh anggota masyarakat dalam kurun waktu yang ditentukan sebagai imbalan atas kontribusi mereka terhadap factor – factor produksi yang membentuk produk nasional. Pendapatan Desa merujuk pada semua penerimaan uang melalui rekening desa dalam satu tahun anggaran, yang tidak diperlukan akan dikembalikan oleh desa (Tomisa & Syafitri, 2020),

Pendapatan berkonsep dalam mengukur kondisi seseorang, dimana menunjukan total uang yang dihasilkan individua tau keluarga dalam waktu tertentu. Dapat diuraikan sebagai keseluruhan penerimaan yang diterima oleh individu yang bekerja, buruh, atau rumah tangga, baik dalam bentuk fisik serta non-fisik selama mereka bekerja dan berusaha (Ramadhan et al., 2023)

Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Langkah ini melibatkan tahap identifikasi, pencatatan, serta pelaporan kegiatan keuangan yang terjadi dalam organisasi atau badan publik termasuk pemerintah dan LSM. Informasi dari transaksi tersebut berguna untuk mendukung pembuatan ketetapan ekonomi oleh pihak pihak yang membutuhkan informasi disebut Akuntansi Sektor Publik (Rusrina, 2020). Akuntansi sektor publik berfokus pada proses audit dan penggunaan sistem akuntansi akan memberikan barang dan jasa yang sesuai dengan keperluan serta hak – hak masyarakat.

Pedoman Akuntansi Dana Desa

Pedoman akuntansi dana desa adalah Kumpulan kebijakan dan Langkah – Langkah yang dibuat untuk mendukung pemerintah desa dalam mengatur dan melaporkan finansial desa secara tepat dan jelas. Pedoman tersebut melibatkan dasar – dasar akuntansi, proses akuntansi, pencatatan dokumen transkasi, pembuatan buku besar, serta penyusunan laporan finansial desa. Tujuan dari pedoman akuntansi dana desa yaitu :1. Memastikan bahwa dana dikelola dnegan efektif dan efesien sesuai peraturan yang berlaku; 2. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dalam penggunaan dana desa; 3. Memudahkan pemerintah desa Menyusun laporan keuangan dan dapat dipertanggung jawabkan.

2. Metode

Studi ini adalah studi deskriptif yang bertujuan unutk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang akuntansi sektor publik sesuai dengan Permendagri No. 113 pada tahun 2014 (Laut Mertha Jaya, 2019) . Metode kualitatif juga digunakan dalam peneltian ini, dengan mengambil studi kasus di pemerintahan Desa Rarang Selatan, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan informasi yang dikumpulkan lalu diproses dan dievaluasi dengan mempertimbangkan elemen yang memiliki keterkaitan langsung dengan peristiwa yang sedang diteliti dan menyatukan seluruh elemen ini dalam analisis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi suatu Lembaga pelaporan terdiri dari prinsip – prinsip akuntansi tertentu dan cara penerapannya yang dianggap oleh manajemen sebagai pendekatan terbaik untuk kondisi saat ini, dengan tujuan untuk menggambarkan posisi keuangan, perubahan dalam posisi keuangan , serta kinerja operasional secara adil sesuai dengan standar akuntansi yang diakui secara luas dan yang telah diterima dalam penyusunan laporann keuangan (Erna, 2020).

Akuntansi mempunyai kebijakan yang mencakup kebijakan tentang pengakuan pendapatan, pengukuran aset dan liabilitas, penyusutan, amortisasi, serta alokasi biaya. Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin bahwa laporan keuangan entitas mencerminkan kinerja keuangan dan posisi keuangan secara benar dan konsisten setiap periodennya, sehingga dapat memberikan informasi yang andal bagi pengguna laporan keuangan, termasuk investor, kreditur, serta pihak yang membutuhkan informasi keuangan tersebut. Pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi harus didasarkan pada pertimbangan professional judgment manajemen, dengan memperhatikan relevansi dan reliabilitas informasi yang disajikan.

3.2. Prosedur Penyusunan Anggaran Desa

Proses pembuatan anggaran di tingkat desa diatur dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Sebelum anggaran disusun, pemerintah desa dapat membuat susunan rangkaian kerja pembanguna desa (RKPDesa) terlebih dahulu. RKPDesa dibuat untuk memberikan pandangan konkret mengenai berbagai proyek yang akan dijalankan selama setahun. Dengan penyusunan RKPDesa, bertujuan untuk memastikan bahwa Pembangunan desa berjalan sesuai rencana dan focus, meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, serta menghasilkan keuntungan yang signifikan untuk seluruh masyarakat desa. Berikut adalah pembahasan tentang APBDesa Rarang Selatan periode anggaran 2021:

Pada penelitian ini memberitahukan pada Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa telah memenuhi syarat dalam mekanisme penyusunan APBD Desa Rarang Selatan tahun 2022. Pengoptimalisasian Akuntansi Sektor Publik yang digunakan oleh pengelola keuangan Desa Rarang Selatan pada tahun 2022 telah memenuhi persyaratan. Sehingga, untuk menguatkan laporan akuntabilitas keuangan desa, perlu ada bukti bahwa dana dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) telah dikelola berdasarkan cara yang terstruktur dan metodis. Sistem manajemen yang efisien akan memungkinkan desa dalam mencapai kemandirian dan memanfaatkan sumber dayanya secara maksimal.

Berdasarkan dari hasil evaluasi kami terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Laporan realisasi anggaran memberitahukan detail terhadap pencapaian pemasukan, pengeluaran, pemindahan keuangan, surplus/defisit, dan aktivitas terhadap biaya yang semuanya dapat diukur terhadap anggaran selama periode yang ditentukan. Laporan ini biasanya dibuat setidaknya sekali dalam setahun. Akan tetapi, tanggal pelaporannya bisa berubah, sehingga laporan realisasi anggaran bisa mencakup tahun yang panjang atau bisa singkat dari satu tahun. Dalam hal ini, entitas perlu menyampaikan : a) penjelasan mengenai mengapa periode pelaporan tidak mengikuti durasi satu tahun standar; b) penyataan bahwa, tidak mungkin untuk membandingnkan angka secara langsung antara laporan realisasi anggaran dan catatan terkait karena perbedaan waktu.

Ketepatan waktu dalam menyediakan laporan realisasi anggaran sangat penting karena keterlambatan dapat mengurangi nilai gunanya. Pelapor diwajibkan untuk menyerahkan laporan ini tidak lebih dari enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Realisasi Anggaran untuk desa Rarang Selatan melakukan perbandingan antara realisasi pendapatan, pengeluaran, surplus/deficit, serta kegiatan pembiayaan, yang semuanya penting untuk penyajian yang adil dan objektif. Laporan ini juga termasuk dalam elemen seperti pendapatan,

pengeluaran, transfer,suplus/deficit, dan pembiayaan.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan; (a) Paling kecil 70% (tujuh puluh perseratus) dari total anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan Pemerintahan Desa, pelaksanaan masyarakat Desa, bimbingan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 126asyarakat Desa**; (b)** Paling besar 30% (tiga puluh perseratus) dari total anggaran belanja Desa digunakan untuk; (1) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa; (2) Operasional Pemerintah Desa; (3) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; (4) Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

3.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Rarang Selatan untuk Tahun Anggaran 2021:

TABEL 1. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAHAN DESA RARANG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)		Ket
1.	**Pendapatan**			
1.1.	**Pendapatan Asli Desa**	**Rp**	**54.467.000,00**	
1.1.1.	Hasil Aset Desa	Rp	44.300.000,00	
1.1.2.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	Rp	10.167.000,00	
1.2.	**Pendapatan Transfer Desa**	**Rp**	**1.566.251.813,00**	
1.2.1.	Dana Desa	Rp	1.026.215.000,00	
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp	60.441.353,00	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	Rp	479.595.560,00	
1.3.	**Pendapatan Lain-Lain Desa**	**Rp**	**2.266.063,86**	
	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp	2.266.063,86	
	Jumlah Pendapatan	**Rp**	**1.622.984.976,86**	
2.	**Belanja**			
2.1.	**Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Des**	Rp	639.288.476,86	
2.2.	**Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**	Rp	455.822.500,00	
2.3.	**Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa**	Rp	30.500.000,00	
2.4.	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**	Rp	25.714.000,00	
2.5.	**Bidang Penanggulangan Bencana, Darura**	Rp	471.600.000,00	
	Jumlah Belanja	**Rp**	**1.622.984.976,86**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**Rp**	-	
3.	**Pembiayaan**			
3.1.	**Pengeluaran Pembiayaan**	Rp	-	
3.1.1	Penyertaan Modal Desa	Rp	-	
	Jumlah Pembiayaan	Rp	-	
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	Rp	-	

Sumber: siskeudes 2022

3.4 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rarang Selatan untuk Tahun Anggaran 2022:

TABEL 2 REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA RARANG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (RP)	Presentase (100%)
1.	**Pendapatan**				
1.1.	**Pendapatan Asli Desa**	**Rp 54.467.000,00**	Rp 27.910.000,00	Rp 26.557.000,00	51,24
1.1.1.	Hasil Aset Desa	Rp 44.300.000,00	Rp 26.910.000,00	Rp 17.390.000,00	60,74
1.1.2.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	Rp 10.167.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 9.167.000,00	9,84
1.2.	**Pendapatan Transfer Desa**	**Rp 1.566.251.813,00**	Rp1.562.482.616,00	Rp 3.769.297,00	99,76
1.2.1.	Dana Desa	Rp 1.026.215.000,00	Rp1.026.215.000,00	Rp -	100,00
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp 60.441.353,00	Rp 60.441.352,00	Rp 1,00	100,00
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	Rp 479.595.560,00	Rp 475.826.264,00	Rp 3.769.296,00	99,21
1.3.	**Pendapatan Lain-Lain Desa**	**Rp 2.266.063,86**	Rp 1.212.074,71	Rp 1.053.989,15	53,49
	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp 2.266.063,86	Rp 1.212.074,71	Rp 1.053.989,15	53,49
	Jumlah Pendapatan	**Rp 1.622.984.976,86**	Rp1.591.604.690,71	Rp 31.380.286,15	98,07
2.	**Belanja**				
2.1.	**Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa**	Rp 639.288.476,86	Rp 609.584.529,00	Rp 29.703.884,86	95,35
2.2.	**Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**	Rp 455.822.500,00	Rp 455.882.500,00	Rp -	100,00
2.3.	**Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa**	Rp 30.500.000,00	Rp 30.500.000,00	Rp -	100,00
2.4.	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**	Rp 25.714.000,00	Rp 25.714.000,00	Rp -	100,00
2.5.	**Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat**	Rp 471.600.000,00	Rp 471.600.000,00	Rp -	100,00
	Jumlah Belanja	**Rp 1.622.984.976,86**	Rp1.593.281.092,00	Rp 29.703.884,86	98,17
	SURPLUS / (DEFISIT)	**Rp -**	-Rp 1.676.401,29	Rp 1.676.401,29	
3.	**Pembiayaan**				
3.1.	**Pengeluaran Pembiayaan**	Rp -	Rp -	Rp -	
3.1.1	Penyertaan Modal Desa	Rp -	Rp -	Rp -	
	Jumlah Pembiayaan	Rp -	Rp -	Rp -	
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	Rp -	Rp 1.676.401,29	Rp 1.676.401,29	

Sumber: siskeudes 2022

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan kebijakan akuntansi dan pengelolaan anggaran yang tepat di pemerintahan Desa Rarang Selatan agar laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi keuangan secara benar, konsisten, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 telah berjalan baik, di mana mekanisme penyusunan APBDesa dan sistem akuntansi publik telah memenuhi standar serta mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. Laporan realisasi anggaran yang disusun dengan benar juga memberikan informasi yang bermanfaat terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa, yang berperan penting dalam mewujudkan keterbukaan serta pertanggungjawaban penggunaan dana. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, desa menjadi lebih mandiri dan mampu mengoptimalkan sumber dayanya untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah desa terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan rutin, memanfaatkan teknologi informasi untuk efisiensi pelaporan, memperkuat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan anggaran, serta melakukan evaluasi dan koordinasi berkelanjutan dengan pemerintah daerah agar tata kelola keuangan desa semakin efektif, transparan, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan desa.

Referensi

Erna. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Akuntansi Dan Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Health Sains*, *1*(5), 527–537. https://doi.org/10.46799/jsa.v1i5.99

Laut Mertha Jaya, I. M. (2019). *ACCOUNTING TREATMENT IN VILLAGE PUBLIC SECTOR PERLAKUAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DESA*. https://www.researchgate.net/publication/335600579_ACCOUNTING_TREATMENT_IN_VILLAGE_PUBLIC_SECTOR_PERLAKUAN_AKUNTANSI_SEKTOR_PUBLIK_DESA

Nevi Costari, & Putri Ariella Belinda. (2021). Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Suatu Instansi Pemerintahan. *Jamanta : Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, *1*(1), 58–77. https://doi.org/10.36563/jamanta_unita.v1i1.421

Pardede, piki, Tafonao, D., & Bululolo, E. (2021). *OPTIMALISASI PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA LOLOSONI KECAMATAN GOMO KABUPATEN NIAS SELATAN 2019/2020*. https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/governanceopinion/article/view/1247

Rusrina, R. (2020). Pengaruh Nilai-Nilai Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Akuntansi S1*, 1–9.

Sari, P., Hanum, N., & Salman, M. (2021). DETERMINAN KINERJA ANGGARAN BERBASIS VALUE FOR MONEY PADA SEKTOR PUBLIK (Studi pada SKPD Aceh Tamiang). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi …*, *2*.

Nabila Fitriani Derajat1, Mahrawi2, U. (2022). 3 1,2,3. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Sains Vol. 3 No. 1, April 2022 : 18-23*, *3*(1), 18–23.

Ramadhan, A., Rahim, M. S. R., Kom, S., Kom, M., & Utami, N. N. (2023). Teori Pendapatan (Studi Kasus: Pendapatan Petani Desa Medan Krio). *Tahta Media*, *02*(2), 34–37. https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/144

Ramlan Sihombing, E. N. (2021). *HUKUM PEMERINTAHAN DESA* (E. Asmadi (ed.)). Enam Media.

Tomisa, M. E., & Syafitri, M. (2020). Pengaruh Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pendapatan Asli Di Desa Sukajadi Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, *9*(1), 91–101. https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v9i1.219